

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN IZIN KHUSUS PENATAAN LAHAN DAN PENGAMBILAN BATUAN SECARA TERBATAS

ARIESTANTIA RISKI K.A

Bukit di Kota Bandar Lampung banyak yang mengalami kerusakan aktifitas pertambangan di Bandar Lampung semakin marak. Diterbitkannya Surat Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas menimbulkan pertanyaan apakah aktivitas perusahaan pertambangan di kota Bandar Lampung memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang atau tidak. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan perizinan usaha pertambangan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan *Qualitative Approach* (Pendekatan Kualitatif). Peneliti menggunakan beberapa kriteria evaluasi kebijakan menurut William Dunn yang dianggap relevan. Pertama adalah kriteria evaluasi formatif dengan indikator pencapaian target populasi yang tepat dan penyampaian kebijakan sesuai spesifikasi kebijakan. Kedua adalah kriteria evaluasi sumatif dengan indikator dampak terhadap individu, rumah tangga, lembaga dan bagaimana kebijakan mempengaruhi kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan pertambangan sudah sesuai dengan spesifikasi kebijakan. Diterbitkannya Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas memunculkan pihak penambang yang tidak berizin dan tidak bisa dimintai keterangan apapun mengenai izin perusahaan. Pihak Dinas yang disinyalir berpindah-pindah terkesan lempar kewenangan dan tarik menarik. Dari hasil wawancara, pelaksanaan kebijakan yaitu apabila perusahaan pertambangan akan mengurus prosedur perizinan maka mengurusnya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sedangkan untuk hal administrasi mengurusnya ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Izin Pengambilan Batuan, Perusahaan Pertambangan

ABSTRACT

EVALUATION OF LIMITED SPECIAL LAND AND RETREATMENT POLICY

BY

ARIESTANTIA RISKI K.A

Many of the hills in Bandar Lampung City which have been damaged by mining activities in Bandar Lampung are increasingly prevalent. The issuance of a Special Permit for Land Arrangement and Stone Extraction Limited raises the question whether the activities of mining companies in the city of Bandar Lampung have official permission from authorized officials or not. The research objective was to describe the mining business licensing in Bandar Lampung City. This research was made using the Qualitative Approach. Researchers used several policy evaluation criteria according to William Dunn that were considered relevant. First is the formative evaluation criteria with indicators of achieving the right population target and the delivery of policies according to policy specifications. Second is the criteria for summative evaluation with indicators of impact on individuals, households, institutions and how policies affect the target group. Based on the results of the research, the implementation of the policies implemented by the mining company is in accordance with the policy specifications. The issuance of a Special Permit for Land Arrangement and Stone Extraction Limited raises miners who are unlicensed and cannot be asked for any information regarding the company's permit. The Service Office which is alleged to be moving seems to throw authority and pull. From the results of the interview, the implementation of the policy is that if the mining company will take care of the licensing procedures then take care of it to the Department of Environment of Bandar Lampung City, while for administrative matters take care of it to the Lampung Province Environmental Office.

Keywords: Policy Evaluation, Rock Collection Permit, Mining Company